



**AGENDA SETTING DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PARIWISATA DI WILAYAH PRAMBANAN, SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA**

**AGENDA SETTING OF TOURISM INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
PROGRAM IN PRAMBANAN, SLEMAN, SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA**

Septyamarsha Arlinasari¹, Pandhu Yuanjaya²

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

²Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Article history:

Diterima 24-01-23

Diperbaiki 15-02-23

Disetujui 20-02-23

Kata Kunci:

agenda setting,
pembangunan, infrastruktur
pariwisata

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui proses *agenda setting* dalam program pembangunan infrastruktur pariwisata di wilayah Prambanan, Sleman, D.I. Yogyakarta. Penelitian ini menjadi penting untuk dilaksanakan karena proses *agenda setting* merupakan proses strategis dalam realitas kebijakan publik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara yang dilakukan pada aktor pemangku kebijakan, serta dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber untuk menentukan keabsahan data dan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini melihat *agenda setting* program pembangunan infrastruktur pariwisata dalam 3 aliran yang memiliki dinamika proses formal yang berjalan, tetapi pada beberapa aliran, proses yang terjadi tidak hanya secara teknokratis dan normatif sebagaimana mestinya. Terjadi tarik-menarik kepentingan dari *stakeholders* terkait sehingga proses politik sangat dominan pada proses *agenda setting*. Akan tetapi, terdapat irisan kepentingan yaitu setiap *stakeholders* terkait mendukung adanya pembangunan infrastruktur pariwisata.

ABSTRACT

Keywords:

agenda setting, development,
tourism infrastructure

This research was conducted to identify the agenda-setting process of the tourism infrastructure development program in Prambanan, Sleman, D.I. Yogyakarta. This research is essential to be carried out because the agenda setting process is a strategic process in the reality of public policy. This research is qualitative research with a descriptive method that uses data collection techniques in the form of observation, interviews conducted with policy actors, and documentation. This research uses source triangulation techniques to determine the validity of the data and data analysis techniques, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study see the agenda setting of tourism infrastructure development programs in 3 streams with formal process dynamics running. Still, in some streams, the process is more than just technocratic and normative as it should be. There is a tug of interest from related stakeholders, so the political process is dominant in the agenda setting process. However, there is an intersection of interests, namely that each relevant stakeholder supports the development of tourism infrastructure.

1. Pendahuluan

Keberadaan infrastruktur memiliki peran penting terhadap roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Sardono (2011) berpendapat bahwa Infrastruktur merupakan komponen utama dalam pengembangan kegiatan ekonomi dan penciptaan kegiatan ekonomi yang efektif. Beberapa kajian ekonomi juga menjelaskan bahwa upaya untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan ekonomi memerlukan fasilitas serta sarana infrastruktur yang baik dan memadai (Atmaja dan Mahalli, 2015).

Pembangunan infrastruktur dipercaya akan mampu menggerakkan berbagai sektor riil di masyarakat karena pembangunan infrastruktur telah mampu memberikan efek peningkatan industrialisasi, mempromosikan sektor pariwisata, hingga mempercepat proses peningkatan supply chain atau rantai pasok (ekon.go.id, 2018). Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor primadona dalam pembangunan industri karena mampu meningkatkan laju pembangunan nasional. Pariwisata terbukti mampu memberikan kontribusi besar dalam perekonomian rakyat dan dapat memberikan pendapatan devisa negara di luar minyak dan gas bumi (Hakim, 2010). Produk ekonomi yang timbul dari kegiatan ekonomi pariwisata memerlukan alat penghubung, perantara serta fasilitas penunjang jasa pariwisata.

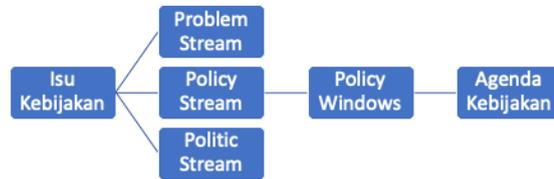
Walaupun pembangunan infrastruktur telah terbukti dapat memberikan berbagai dampak positif, kritik mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur tetap muncul. Berbagai kalangan terus mempertanyakan kegunaan pembangunan infrastruktur yang juga banyak mendapat cacian karena penggunaan anggaran yang besar (kompas.tv, 2021). Dengan berbagai perbandingan program lain yang berdampak langsung dan cepat terhadap masyarakat, pembangunan infrastruktur jelas memiliki keunggulan dilihat dari dampak terhadap pembangunan jangka panjang. Manfaat yang ditimbulkan dari pembangunan infrastruktur akan dapat memberikan harapan baru terhadap masyarakat terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan. Tetapi, tidak dapat dipungkiri saat ini infrastruktur Indonesia terbelang cukup jauh tertinggal sehingga pembangunan infrastruktur sudah seharusnya menjadi fokus utama pemerintah.

Pelaksanaan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari sisi regulasi mengingat dalam pembangunan perlu adanya peraturan yang mengikat agar pelaksanaan pembangunan dapat tertata dan berjalan efektif serta efisien. Regulasi yang dibuat tentunya harus dapat menyeimbangkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga pembangunan dapat mencapai tujuan yaitu pencapaian kesejahteraan yang merata (Muhlizi, 2017). Pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh sebagai pembuat kebijakan yang tentunya pemerintah daerah juga pula lah yang berwenang untuk menentukan prioritas permasalahan publik di daerah. Penentuan permasalahan tersebut termasuk ke dalam siklus kebijakan yaitu penetapan agenda atau *agenda setting*

Agenda setting memberikan ruang untuk memaknai sebuah permasalahan publik dan prioritas agenda publik yang dipertarungkan. Apabila sebuah isu

berhasil menjadi sebuah masalah publik, maka isu tersebut berhak untuk ditindaklanjuti dengan mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain (Anggara, 2014). Banyak definisi yang menggambarkan proses dari sebuah *agenda setting*, salah satunya Kingdon (1984) yang menyebutkan bahwa proses *agenda setting* merupakan proses mempersempit persoalan yang terjadi di masyarakat untuk menjadi fokus perhatian pemerintah.

Kingdon (1984) mengungkapkan bahwa isu kebijakan muncul setelah konflik atau perbedaan persepsi muncul diantara para aktor kepentingan. Isu tersebut berproses melalui model *agenda setting* yaitu *multiple stream framework*. Model *agenda setting* digambarkan melalui tiga aliran kebijakan yaitu aliran masalah (*problem stream*), aliran kebijakan (*policy stream*), dan aliran politik (*political stream*). Alur mengenai model *agenda setting multiple stream framework* dapat dilihat pada bagan berikut.



Gambar 1. Bagan Model Agenda Setting menurut Kingdon
Sumber: Kingdon (2003)

Penentuan permasalahan prioritas dalam penyusunan kebijakan pembangunan melalui proses *agenda setting* diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah permasalahan kemiskinan yang hingga saat ini masih menjadi persoalan utama yang berada di berbagai wilayah di Indonesia termasuk D.I. Yogyakarta. Hal tersebut ditunjukkan dengan jumlah penduduk miskin menurut Kabupaten Kota yang digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten Kota di DIY Tahun 2019-2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribuan)	
	2019	2020
1. Kulonprogo	74,62	78,06
2. Bantul	131,15	138,66
3. Gunungkidul	123,08	127,61
4. Sleman	90,17	99,78
5. Yogyakarta	29,45	31,62
D.I. Yogyakarta	448,47	475,72

Sumber: Yogyakarta.bps.go.id (2021)

2.

Wilayah administratif DIY yang memiliki berbagai potensi perekonomian di dalamnya pada kenyataannya belum bisa terlepas dari belenggu kemiskinan. Kapanewon Prambanan sebenarnya telah memiliki berbagai destinasi wisata yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber utama pendapatan masyarakat seperti Candi Prambanan, Tebing Breksi, *Obelix Hills*, Candi Ratu Boko, Candi Ijo, Candi

Plaosan dan masih banyak lainnya. Akan tetapi, menurut Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 401/0161 tentang Penyampaian 15 Lokus Kapanewon Penanggulangan Kemiskinan, Kapanewon Prambanan termasuk di dalamnya. Hal itu mempertegas perlunya pembangunan terutama pengoptimalan sumber daya yang dimiliki dalam wilayah tersebut. Sehingga saat ini, pembangunan infrastruktur tersebut diperlukan dalam rangka menopang kegiatan ekonomi sektor pariwisata.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses *agenda setting* program pembangunan infrastruktur pariwisata di Wilayah Prambanan, Sleman, D.I. Yogyakarta diperlukan agar tercipta kebijakan-kebijakan populis yang dapat memberikan manfaat secara meluas untuk masyarakat. Sehingga berdasarkan urgensi permasalahan tersebut penelitian mengenai *agenda setting* program pembangunan infrastruktur pariwisata di Kapanewon Prambanan perlu dilakukan. Apabila permasalahan ini tidak ditelaah lebih jauh dikhawatirkan pembangunan dilakukan tidak berdasarkan prioritas penanganan permasalahan yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa proses *agenda setting* program pembangunan infrastruktur di Kapanewon Prambanan yang nantinya melalui penelitian dapat menjadi pegangan, memberikan masukan, serta menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi peningkatan kapasitas dan kinerja dari pihak-pihak yang terkait. Penelitian ini menggunakan teori *agenda setting* dari Kingdon (1983) yang memetakan proses *agenda setting* melalui 3 *framework* atau aliran yaitu aliran masalah, aliran kebijakan dan aliran politik.

2. Metode Penelitian

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik atau metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Secara umum, penelitian kualitatif merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh seseorang dengan berbagai macam tahapan dimulai dari penentuan topik, lalu dilanjutkan dengan pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga pada akhirnya diperoleh suatu pemahaman (Raco, 2010). Jenis penelitian ini dipilih karena deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bersifat lapangan atau *field research* yang berusaha untuk memberikan penggambaran dari suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang kemudian dijabarkan sebagaimana adanya.

2.2. Lokasi dan Waktu

Penelitian tentang *agenda setting* program pembangunan infrastruktur pariwisata ini telah dilaksanakan di DPRD Prov. DIY, DPUP-ESDM DIY, DPRD Kab. Sleman, DPUPKP Kab Sleman, Kapanewon Prambanan serta wilayah administratif Kapanewon Prambanan. Sedangkan, untuk waktu penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juli hingga Desember 2022.

2.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian terdiri atas: 1) Ketua Komisi C DPRD DIY; 2) Anggota DPRD DIY dengan dapil Prambanan; 3) Perencana Muda Subbag Program DPUP-ESDM DIY; 4) Anggota DPRD Kab. Sleman dengan dapil Prambanan; 5) Kasubag Perencanaan dan Evaluasi DPUPKP Kab. Sleman; 6) Analis Bidang Perencanaan

dan Evaluasi DPUPKP Kab. Sleman; 7) Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Prambanan; 8) Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian Kapanewon Prambanan; 9) Kepala Pedukuhan Kikis; 10) pengelola objek wisata dan pemilik usaha di sekitar objek wisata.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data dan berbagai keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti menggunakan tiga teknik dasar yang sesuai dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Wawancara mendalam merupakan interaksi/pembicaraan yang terjadi antara satu orang pewawancara dengan satu orang informan (Manzilati, 2017). Penggunaan teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan menggali informasi secara mendalam mengenai pelaksanaan *agenda setting* dalam program pembangunan infrastruktur pariwisata di wilayah Prambanan, Sleman, D.I. Yogyakarta. Dalam proses pelaksanaan wawancara, peneliti menemukan beberapa hambatan dikarenakan kesibukan dari beberapa informan sehingga pelaksanaan wawancara memerlukan waktu yang cukup lama. Selain itu, aspek politis selama *agenda setting* pembangunan infrastruktur pariwisata di Kapanewon Prambanan yang sangat dominan menyebabkan beberapa narasumber kurang terbuka dalam memberikan informasi serta terdapat beberapa pihak yang ingin data dirinya dirahasiakan

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi. Menurut Sugiyono (2016), dalam sebuah penelitian, seorang peneliti akan terlibat secara langsung agar mengetahui bagaimana proses penanganan terhadap suatu permasalahan yang terjadi. Berdasarkan bentuk keterlibatan peran peneliti, observasi dapat dibagi menjadi dua yaitu keterlibatan langsung (*participants* observasi) dan keterlibatan tidak langsung (*non-participant*) (Cresswell, 2015). Penelitian ini menggabungkan kedua bentuk observasi tersebut. Penggunaan bentuk *participants* observasi dilakukan dengan peneliti yang terlibat langsung dalam proses penjarangan aspirasi (RESES) yang dilaksanakan di Padukuhan Kikis, Sambirejo, Prambanan pada hari Jumat, 9 September 2022 dan juga rapat mitra kerja Komisi C DPRD DIY dan DPUP-ESDM DIY pada hari Kamis, 28 Juli 2022. Peneliti juga menggunakan observasi *non-participant* yang merupakan bentuk keterlibatan tidak langsung peneliti dengan peneliti hanya sebagai *outsider* dari partisipan yang sedang diteliti

Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi. Teknik pengumpulan data dokumentasi berisikan dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang dapat bermanfaat dalam proses penelitian kualitatif (Yusuf, 2014). Penelitian ini menggunakan beberapa dokumen sebagai bahan-bahan pustaka yang berupa buku, jurnal, surat kabar, maupun karya ilmiah lainnya yang berasal dari instansi terkait maupun media massa serta media sosial yang berkaitan dengan topik permasalahan penelitian yaitu pelaksanaan *agenda setting* dalam program pembangunan infrastruktur pariwisata di wilayah Prambanan, Sleman, D.I. Yogyakarta.

2.5. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti memiliki peran untuk bertindak sebagai instrumen sekaligus berperan sebagai pengumpul data. Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti menjadi mutlak karena peneliti harus melakukan interaksi dengan lingkungan di lapangan (Murni, 2017). Instrumen penelitian juga merupakan suatu alat yang dibutuhkan dalam proses pengumpulan data. Instrumen yang dimaksud adalah manusia atau peneliti itu sendiri yang mengumpulkan data melalui berbagai cara seperti bertanya, meminta, mendengar, ataupun mengambil (Afrizal, 2014). Penelitian ini menggunakan sumber data yang utama yaitu kata-kata dan tindakan dan yang selanjutnya menjadi tambahan, yaitu dokumen penunjang dan lainnya.

2.6. Sumber dan Jenis Data

Jenis dan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sekunder. Adapun data primer dari penelitian ini merupakan seluruh data yang diperoleh langsung dari informan terkait yang memiliki keterlibatan langsung dengan proses *agenda setting* program pembangunan infrastruktur pariwisata di wilayah Prambanan, Sleman, D.I. Yogyakarta. Sedangkan data sekunder merupakan data-data maupun informasi-informasi yang mendukung dan relevan dengan fokus penelitian. Sumber data sekunder ini didapatkan dari laporan penelitian, jurnal, buku terdahulu maupun dokumen pendukung mengenai topik permasalahan.

2.7. Teknik Keabsahan Data

Tahapan pemeriksaan terhadap keabsahan data atau validitas data menjadi tahapan yang penting dalam penelitian kualitatif. Validitas data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik triangulasi sumber merupakan sebuah teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan cara dengan metode membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan dokumentasi serta pengecekan penemuan hasil penelitian (Moleong, 2010). pada penelitian ini peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa informan yang berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan *agenda setting* dalam program pembangunan infrastruktur pariwisata di wilayah Prambanan, Sleman, D.I. Yogyakarta. Dari hasil wawancara, data yang memiliki variasi beragam dipilih dan diklasifikasi berdasarkan kebutuhan penelitian. Klasifikasi tersebut akan memberikan tingkat keabsahan data dalam penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi untuk meningkatkan keabsahan data. Selanjutnya, peneliti melakukan pengumpulan data dalam bentuk arsip dokumen yang didapatkan di lapangan dan beberapa arsip yang didapatkan dari berbagai pihak lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil dari seluruh pengumpulan data tersebut menghasilkan validitas.

2.8. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data yang diperlukan, data kemudian diolah dan dianalisis lebih lanjut. Pada tahapan analisis ini, data yang ada diklasifikasikan sesuai dengan kategori yang sesuai. Pada penelitian ini, analisis data yang dilakukan berupa

analisis naratif dengan upaya peneliti dalam menyampaikan data, melakukan pengorganisasian data, mengklasifikasikan data sesuai satuan yang dikelola, mencari dan menemukan pola penting dengan langkah-langkah yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Menurut Sugiyono (2016) reduksi data merupakan bentuk kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang penting yang kemudian difokuskan dan ditentukan tema serta polanya. Pada langkah ini, data yang diperoleh langsung dari lapangan diketik maupun ditulis dengan rinci, rapi dan sistematis. Data tersebut berkaitan dengan topik permasalahan peneliti yaitu *agenda setting* program pembangunan infrastruktur pariwisata di Wilayah Prambanan, Sleman, D.I. Yogyakarta.

Penyajian data pada penelitian ini menggunakan bentuk teks naratif. Informasi yang diperoleh disajikan dengan sistematis dan tersusun sehingga dapat memberikan adanya penarikan kesimpulan. Dalam tahap penyajian data ini, peneliti menyajikan data yang telah diperoleh dari baik data primer maupun sekunder yang dilakukan secara singkat dan jelas dalam bentuk matriks, chart, ataupun grafik dan bagan.

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan yang menunjukkan bahwa data yang telah disediakan kemudian dibahas secara rinci, sehingga data akan menjadi mudah untuk ditarik kesimpulan. Kesimpulan berguna sebagai jawaban dari permasalahan dalam penelitian. Apabila kesimpulan yang sudah disampaikan pada tahap awal didukung dengan berbagai bukti yang dapat dibuktikan validitasnya dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2016).

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa keberadaan infrastruktur sangatlah penting untuk menunjang berbagai kegiatan dari masyarakat. Agenda pembangunan merupakan bentuk refleksi serta cita-cita kemerdekaan dan pancasila (Muhlizi, 2017). Dengan potensi dalam bidang perekonomian dan pariwisata menjadikan pembangunan infrastruktur di kawasan Kapanewon Prambanan sudah seharusnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Sektor pariwisata terbukti memberikan kontribusi besar terhadap pemulihan sektor ekonomi pasca terdampak COVID-19 di Kabupaten Sleman. Hal tersebut didasari atas peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Sleman sektor pariwisata yakni sebesar 18% pada tahun 2021. PAD sektor pariwisata Kab. Sleman pada tahun 2021 mampu mencapai angka Rp 147 Miliar sedangkan pada tahun 2020 PAD sektor pariwisata Kab. Sleman hanya berada pada angka Rp 117 Miliar. Sektor pariwisata dapat menjadi salah satu strategi penguat sektor perekonomian yang akan berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan tersebut tidak bisa dilepaskan dari sisi regulasi sehingga penyelesaian permasalahan yang terjadi dapat segera terwujud. Pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh sebagai pembuat kebijakan yang tentunya pemerintah daerah juga pula lah yang berwenang untuk menentukan prioritas permasalahan publik di daerah. Penentuan permasalahan tersebut termasuk ke dalam siklus kebijakan yaitu penetapan agenda atau *agenda setting*.

Keterlibatan berbagai *stakeholders* memengaruhi terjadinya dinamika proses *agenda setting* program pembangunan infrastruktur pariwisata yang berlangsung di Wilayah Prambanan, Sleman, D.I. Yogyakarta. Setiap aktor memiliki kepentingan yang berbeda sehingga terjadi tarik-menarik kepentingan selama proses *agenda setting* berlangsung. Kepentingan tersebut saling diperjuangkan yang menyebabkan pula terjadinya konflik dalam penentuan isu permasalahan hingga pemberian alternatif solusi pada proses *agenda setting*. Adapun keterlibatan *stakeholders* pada proses *agenda setting* program pembangunan infrastruktur pariwisata dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Tabel Keterlibatan *Stakeholders*

<i>Stakeholders</i>	Peran dan Fungsi	Kepentingan
DPRD DIY	Perumusan masalah, penghimpunan aspirasi dan isu permasalahan melalui beberapa agenda seperti <i>reses</i> , <i>public hearing</i> , musrembang dan memiliki fungsi legislasi dan fungsi anggaran	Menjaga kepercayaan konstituen dan menyelesaikan permasalahan
DPRD Kab. Sleman	Perumusan masalah, penghimpunan aspirasi dan isu permasalahan melalui beberapa agenda seperti <i>reses</i> , <i>public hearing</i> , musrembang dan RAKORPIM dan memiliki fungsi legislasi dan fungsi anggaran	Menjaga kepercayaan konstituen dan menyelesaikan permasalahan
DPUP-ESDM DIY	Pelaksana teknis pembangunan infrastruktur tingkat provinsi	Melaksanakan program kerja
DPUPKP Kab. Sleman	Pelaksana teknis pembangunan infrastruktur tingkat kabupaten	Melaksanakan program kerja
Kapanewon Prambanan	Perumusan masalah, pengoordinasi permasalahan di tingkat kapanewon serta pelaksana, pengawas, wadah aspirasi pembangunan infrastruktur	Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Organisasi Pemerintahan Daerah
Masyarakat	Berkontribusi dalam penyusunan dan pemberian isu masalah pembangunan infrastruktur, Pemberi bahan pertimbangan dan objek program pembangunan infrastruktur	Mengusulkan dan melaksanakan program pembangunan infrastruktur

Sumber: Diolah Peneliti (2022)

Program pembangunan infrastruktur pariwisata dilakukan atas dasar permasalahan di masyarakat seperti kemiskinan dan kesejahteraan sehingga memicu adanya tuntutan terhadap pemerintah untuk mencari solusi permasalahan. Permasalahan yang terjadi di masyarakat tersebut menjadi amunisi bagi aktor-aktor yang terlibat aktif dalam pembentukan kebijakan program pembangunan infrastruktur pariwisata. Untuk membuat suatu masalah menjadi bahan pertimbangan oleh pemerintah, maka diperlukan *agenda setting* kebijakan yang didalamnya terdapat tarik-menarik kepentingan yang berbeda dari setiap aktor pemangku kepentingan. Akan tetapi, perbedaan kepentingan dari setiap *stakeholders* yang terlibat memiliki irisan yang sama yaitu kepentingan dalam rangka mendukung terealisasinya program pembangunan infrastruktur di Kapanewon Prambanan untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan berkaitan dengan kemiskinan dan kesejahteraan.

Program pembangunan infrastruktur pariwisata di Kapanewon Prambanan berproses melalui model *agenda setting* yaitu *multiple stream framework*. Model *agenda setting* tersebut digambarkan melalui tiga aliran kebijakan yaitu aliran masalah (*problem stream*), aliran kebijakan (*policy stream*), dan aliran politik (*political stream*). Adapun deskripsi hasil penelitian dijabarkan sebagai berikut.

3.1. Aliran Masalah

Model *agenda setting* digambarkan melalui aliran yang pertama yaitu aliran masalah (*problem stream*). Dalam aliran ini, secara garis besar telah menunjukkan suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Peristiwa tersebut kemudian akan berkembang dan dirasakan sebagai masalah. Masalah yang terjadi akan menjadi perhatian publik dan aktor kepentingan pembuat kebijakan agar nantinya permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Aliran masalah dalam program pembangunan infrastruktur pariwisata di Prambanan, Sleman, D.I. Yogyakarta muncul diawali dengan berbagai peristiwa sebagaimana dituliskan dalam dokumen internal DPRD DIY yakni Wilayah DIY yang termasuk kedalam kategori wilayah dengan pergerakan ekonomi dinamis dengan penopang yaitu pelaku usaha yang memanfaatkan pariwisata sehingga menjadikan ekonomi DIY memiliki variasi cukup banyak. Kondisi perekonomian makro wilayah DIY tersebut belum mampu mengatasi berbagai permasalahan yang masih kerap terjadi di masyarakat. Permasalahan “klasik” yang hingga kini masih terjadi di hampir seluruh wilayah administratif DIY adalah kemiskinan dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah. Dalam era *Millennium Development Goals* (MDGs) dan kemudian dilanjutkan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), penanganan kemiskinan selalu menduduki urutan teratas (Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY terhadap RKPD DIY Tahun 2023).

Provinsi DIY memiliki peraturan daerah sebagai acuan dan dasar perencanaan dan pelaksanaan program serta aktivitas penanggulangan kemiskinan. Sesuai dengan Perda DIY Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan, salah satu kelompok program atau aktivitas penanggulangan kemiskinan adalah pemenuhan akses terhadap sumberdaya. Dengan demikian program pembangunan infrastruktur akan dapat menjadi salah satu bentuk upaya mengatasi permasalahan yang terjadi di Kapanewon Prambanan.

Tentunya, berbagai permasalahan terjadi di Kapanewon Prambanan. Tetapi, tidak semuanya masuk kedalam agenda kebijakan pemerintah. *Agenda setting* memiliki peran penting terhadap terciptanya *public awareness* dengan menekankan isu permasalahan untuk diatur dalam skala prioritas dan ditindaklanjuti dengan tepat. *Agenda setting* merupakan tahapan awal dalam proses pembuatan kebijakan sehingga berperan penting terhadap *output* ataupun *outcome* dari sebuah kebijakan. Proses *agenda setting* dimulai dari pemunculan isu permasalahan yang kemudian disusun skala prioritasnya sehingga muncul berbagai alternatif solusi permasalahan yang ditentukan melalui tindakan politik. Sebelum dibuat langkah penyelesaiannya, isu-isu permasalahan yang terjadi di masyarakat diinterpretasikan dan diseleksi terlebih dahulu oleh pemerintah (Darmawan dan Nurmadi, 2015).

Melalui proses panjang tersebut, berbagai pandangan dan asumsi dari berbagai pihak diperlukan sehingga kebijakan yang diambil nantinya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan publik.

Adapun isu permasalahan terkait program pembangunan infrastruktur pariwisata di Kapanewon Prambanan yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Tabel Isu Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata di Kapanewon Prambanan

No	Isu Permasalahan	Stakeholders terkait asal pemunculan isu masalah
1.	Jumlah wisatawan menurun sehingga perekonomian terdampak	Legislatif
2.	Perlu kemudahan transportasi menuju objek wisata	Legislatif
3.	Ruas Jalan rusak	Legislatif dan Eksekutif
4.	Akses mobilitas masyarakat terbatas	Legislatif
5.	Masih banyak permasalahan baik yang memiliki kaitan dengan fasilitas umum maupun pemberdayaan masyarakat.	Legislatif
6.	Sarana prasarana dan fasilitas umum masih banyak yang rusak. Sering terjadi kecelakaan dikarenakan jalan rusak.	Legislatif
7.	Terdapat banyak permasalahan terkait dengan pengadaan infrastruktur. Selain itu, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena masa pandemi ini.	Legislatif
8.	Warga desa memerlukan cor penguat jalan. Selain itu sudah ada lampu penerangan jalan tetapi untuk tiangnya belum ada.	Legislatif
9.	Tidak adanya penerangan jalan yang memadai	Eksekutif
10.	Perlunya peningkatan kualitas jalan	Eksekutif
11.	Perlunya peningkatan kualitas jalan	Eksekutif
12.	Perlunya pembangunan talud jalan	Eksekutif

Sumber: Diolah Peneliti (2022)

Dalam penentuan isu masalah pada aliran ini, terjadi proses politis dari keterlibatan aktor pemangku kepentingan. Proses politis terlihat jelas pada proses seleksi suatu peristiwa masuk ke dalam isu permasalahan yang kemudian akan menjadi agenda kebijakan. Tiap-tiap kelompok masyarakat dan lembaga yang berwenang saling memperjuangkan agar isu permasalahan yang terjadi di daerah mereka dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Adanya dominasi kepentingan pihak tertentu dipertegas dengan temuan penelitian ini yang menunjukkan lebih banyak serapan isu permasalahan mengenai pembangunan infrastruktur pariwisata yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi dari konstituen masing-masing anggota dewan.

3.2. Aliran Kebijakan

Setelah permasalahan publik diidentifikasi, diseleksi dan disusun berdasarkan skala prioritas melalui proses politis yang panjang, permasalahan

tersebut masuk kedalam agenda kebijakan. Langkah selanjutnya yang akan diambil oleh para aktor penyusun kebijakan adalah menentukan solusi pemecahan masalah. Alternatif penyelesaian atas permasalahan yang terjadi di masyarakat dibuat dalam rangkaian proses aliran kebijakan (*policy stream*). Alternatif solusi yang muncul tidak semata-mata timbul dari sisi pemerintahan saja, tetapi pihak non-pemerintahan juga terlibat dalam memberikan alternatif permasalahan.

Dalam aliran kebijakan, muncul tuntutan untuk menentukan solusi pemecahan masalah. Keterlibatan *stakeholders* di dalam maupun luar pemerintah diperlukan sebagai aktor pembuat solusi permasalahan yang terjadi (Kingdon, 2003). Dalam aliran kebijakan akan muncul alternatif kebijakan yang diberikan oleh pihak terkait dalam mengatasi masalah yang muncul dari seluruh level pemerintahan (Puspita, dkk., 2016). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam aliran kebijakan muncul berbagai alternatif solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur pariwisata di Kapanewon Prambanan, Sleman, D.I. Yogyakarta.

Penelitian ini berhasil merangkum alternatif solusi dalam permasalahan yang terjadi di masyarakat terutama permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur melalui berbagai kebijakan sebagai berikut.

Tabel 4. Alternatif Solusi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur di Kapanewon Prambanan

No	Identifikasi Masalah	Alternatif Solusi
1.	Jumlah wisatawan menurun sehingga perekonomian terdampak	Pengembangan destinasi wisata sesuai dengan <i>sustainable tourism development</i>
2.	Perlu kemudahan transportasi menuju objek wisata	Penataan sistem aksesibilitas dan manajemen transportasi ke lokasi destinasi wisata
3.	Fasilitas umum penerangan jalan yang kurang memadai	Pembangunan fasilitas umum melalui APBD, Dana Keistimewaan, dan Dana BKK
4.	Kualitas jalan yang tidak layak	Program pembangunan dan pemeliharaan jalan
5.	Sarana prasarana penunjang aktifitas masyarakat yang kurang serta pengangguran	Program padat karya infrastruktur
6.	Permasalahan irigasi dan talud jalan	Program pembangunan talud melalui APBD, Dana Keistimewaan, dan Dana BKK
7.	Permasalahan pembangunan skala kecil atau ringan	Pengalokasian dana swadaya masyarakat dan iuran serta pemanfaatan dana kas

Sumber: Diolah Peneliti (2022)

Alternatif solusi yang muncul pada proses aliran kebijakan dalam program pembangunan infrastruktur di Kapanewon Prambanan, Sleman, D.I. Yogyakarta diantaranya Kebijakan Umum APBD (KUA), Kebijakan pengalokasian Dana Keistimewaan, Kebijakan Bantuan Khusus Keuangan, dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus yang menjadi dasar pelaksanaan program pembangunan. Dalam aliran kebijakan, seluruh *stakeholders* yang terlibat bersinergi bersama untuk menentukan alternatif solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan. Berbagai ruang interaksi diberikan agar seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam penentuan alternatif solusi. Kepentingan pribadi, kelompok tertentu, lembaga umum, maupun

kepentingan politik dapat menjadi usulan pemecahan masalah (Puspita, dkk., 2016).

Pembuatan kebijakan dalam pengelolaan keuangan disusun dalam rangka memenuhi *mandatory spending* mengenai pengalokasian belanja infrastruktur pelayanan publik yang harus menggunakan minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Tentunya, kebijakan tersebut mendukung pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pariwisata di Kapanewon Prambanan, Sleman, D.I. Yogyakarta. Kebijakan tersebut juga dapat menjadi alternatif solusi yang tepat dalam menangani permasalahan yang terjadi di masyarakat. Solusi program pembangunan infrastruktur pariwisata diperlukan mengingat keseluruhan sistem infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ardinugroho, dkk., 2019).

3.3. Aliran Politik

Berbagai isu permasalahan muncul seperti pada aliran masalah yang telah dijabarkan sebelumnya. Beberapa alternatif solusi pun telah dibuat dalam aliran kebijakan. Tetapi, pada prakteknya, permasalahan yang terjadi di masyarakat tidak bisa langsung masuk kedalam agenda kebijakan dan mendapatkan alternatif solusi penyelesaian. Isu permasalahan yang berubah menjadi agenda kebijakan sangat dipengaruhi dengan proses politik bersamaan dengan pelaksanaan distribusi kekuasaan.

Dalam penelitian ini, aliran politik yang berjalan menunjukkan bahwa Keterlibatan politik dalam proses *agenda setting* program pembangunan infrastruktur pariwisata di Kapanewon prambanan menyebabkan timbulnya *conflict of interest*. Konsensus antara pihak-pihak tertentu muncul dengan konflik kepentingan dari segelintir aktor pemangku kepentingan. Dalam hal ini, hubungan afiliasi antara lembaga pemerintahan daerah yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa dengan calon rekanan berpotensi dalam mempengaruhi keputusan akhir yang akan diambil. Situasi tersebut nantinya juga akan berpengaruh pada kualitas keputusan yang diambil. Dengan adanya *conflict of interest* dalam proses *agenda setting*, maka netralitas keputusan akan dipertanyakan sehingga langkah tepat perlu dilakukan agar konsensus yang terbentuk dapat berjalan dengan optimal.

Sebagian besar narasumber dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur di Kapanewon Prambanan sangat diperlukan. Pembangunan sudah seharusnya dapat memperhatikan kepentingan serta memberikan kesempatan untuk melibatkan masyarakat untuk berperan aktif baik secara langsung maupun tidak langsung. Dorongan untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam menginisiasi, mendukung, merencanakan serta membuka peluang dalam proses pembangunan.

Aliran politik memiliki pengaruh yang besar dalam keputusan agenda kebijakan. Hal tersebut dikarenakan faktor-faktor kekuatan politik akan bersaing dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya untuk menentukan keputusan. Faktor kekuatan politik tersebut diantaranya ialah opini iklim publik yang menunjukkan situasi dan kondisi yang terjadi. Lalu, ada kekuatan organisasi politik yang

mendominasi suatu daerah. Selain itu, ada upaya pembentukan konsensus serta peran dari berbagai individu maupun kelompok kepentingan sehingga muncul tuntutan untuk membuat keputusan (Darmawan dan Nurmandi, 2015).

Pembentukan konsensus tentunya memerlukan kontribusi banyak pihak. Keterlibatan aktor pemangku kepentingan dalam pembentukan konsensus merupakan proses tawar-menawar untuk menghasilkan sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan. Konsensus yang terbentuk dalam aliran politik memberikan kesempatan dan dorongan kepada alternatif solusi yang kemudian dipasangkan dengan masalah yang terjadi sehingga dapat menjadi agenda kebijakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses *agenda setting* program pembangunan infrastruktur pariwisata di Kapanewon Prambanan melibatkan proses politik yang dominan. Dalam proses *agenda setting*, aliran politik adalah aliran yang paling menonjol (Putri, dkk., 2022). Berbagai isu permasalahan publik terjadi di Kapanewon Prambanan telah memasuki kriteria sebagai penentuan masalah, tetapi isu tersebut tidak otomatis masuk ke dalam agenda kebijakan. Isu permasalahan tersebut harus diproses melalui kekuatan politik untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Dengan demikian, pengaruh kekuasaan dan dominasi politik mempengaruhi akses dalam penentuan masalah di Kapanewon Prambanan.

Proses penentuan masalah hingga pemberian alternatif solusi pada *agenda setting* program pembangunan infrastruktur pariwisata di Prambanan, Sleman, D.I. Yogyakarta diharapkan mampu menghasilkan dampak dan pengaruh positif bagi kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah sebagai *policy maker* seharusnya dapat mendesain kebijakan publik sehingga akan menghasilkan penyelesaian dan tidak berdampak pada polemik kebijakan (Mustari, 2015). Tentunya, dampak dan pengaruh positif yang diharapkan tercipta dari program pembangunan infrastruktur pariwisata itu. Dengan demikian, program pembangunan infrastruktur pariwisata akan berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat disekitar lokasi pembangunan infrastruktur.

Pembangunan dari suatu daerah merupakan bentuk investasi besar dari pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pariwisata di Kapanewon Prambanan dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan menanggulangi kemiskinan yang terjadi. Pembangunan infrastruktur pariwisata juga dilakukan karena dapat memengaruhi berbagai sektor perekonomian yang ada di Kapanewon Prambanan.

Berbagai tanggapan positif muncul dari program pembangunan infrastruktur pariwisata di Kapanewon Prambanan. Beberapa pelaku usaha yang berada di Kapanewon Prambanan menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur pariwisata dapat membantu perekonomian masyarakat disana. Pembangunan infrastruktur pariwisata yang telah dilakukan memberikan dampak terhadap mudahnya akses dan menyebabkan tingginya angka kunjungan wisatawan disana. Banyaknya kunjungan wisatawan juga memengaruhi pendapatan cafe maupun tempat usaha kecil seperti toko kelontong yang berada di sepanjang jalan menuju lokasi objek wisata.

Meskipun membawa dampak positif, pembangunan infrastruktur jalan juga memberikan dampak negatif diantaranya: (1) berkurangnya lahan produktif pertanian, (2) adanya pengurangan luasan lahan terbuka hijau, dan (3) rusaknya

lingkungan hidup disekitar pembangunan jalan (Prapti, dkk., 2015). Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa pembangunan infrastruktur pariwisata terutama jalan yang dilakukan di Kapanewon Prambanan memberikan dampak negatif yaitu berkurangnya lahan milik warga yang dialokasikan untuk jalan.

Selain itu, permasalahan lain juga timbul dari adanya pembangunan infrastruktur pariwisata di Kapanewon Prambanan secara tidak langsung yaitu proses ganti rugi kepemilikan lahan yang secara administratif sulit dilakukan dan permasalahan sampah yang timbul karena meningkatnya kunjungan wisatawan di Kapanewon Prambanan. Tentunya, permasalahan dan dampak negatif dari pembangunan infrastruktur pariwisata dapat diatasi melalui proses perencanaan yang baik. Konsekuensi yang timbul dari proses pembangunan infrastruktur pariwisata di Kapanewon Prambanan dapat diminimalisir dengan langkah penentuan masalah yang baik dengan keterlibatan seluruh *stakeholders*.

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses *agenda setting* dalam Program Pembangunan Infrastruktur Pariwisata di Wilayah Prambanan, Sleman, DIY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses *agenda setting* program pembangunan infrastruktur pariwisata memiliki dinamika proses formal yang berjalan, tetapi pada beberapa aliran, proses yang terjadi tidak hanya secara teknokratis dan normatif sebagaimana mestinya. Penentuan isu permasalahan program pembangunan infrastruktur pariwisata di Kapanewon Prambanan didominasi dengan proses politik dan terjadi tarik-menarik kepentingan dari setiap *stakeholders* yang terlibat. Walaupun demikian, terdapat irisan kepentingan yaitu seluruh aktor pemangku kebijakan dan masyarakat mendukung adanya pembangunan infrastruktur pariwisata yang dapat menjadi solusi permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat Kapanewon Prambanan.

Dalam siklus kebijakan, terdapat proses yang dapat dikatakan memiliki posisi sentral yaitu penetapan masalah atau *agenda setting*. Pada proses *agenda setting*, aktor-aktor kebijakan memiliki peran penting untuk memahami bagaimana isu-isu publik terjadi, berubah, dan memiliki pengaruh terhadap perubahan kebijakan. Aktor pemangku kepentingan dalam agenda setting program pembangunan infrastruktur pariwisata di Prambanan, Sleman, D.I. Yogyakarta memiliki keterlibatan dan partisipasi yang akan memengaruhi pelaksanaan program infrastruktur pembangunan pariwisata tersebut. Keterlibatan dari berbagai pihak tersebut diperlukan dalam rangka pembentukan konsensus sehingga penindaklanjutan program pembangunan infrastruktur pariwisata dapat dilakukan dengan baik. Proses *agenda setting* program pembangunan infrastruktur pariwisata di wilayah Prambanan, Sleman, D.I. Yogyakarta melalui tiga alur aliran yaitu aliran masalah, aliran kebijakan, dan aliran politik.

Aliran masalah (*problem stream*) pada proses *agenda setting* program pembangunan infrastruktur pariwisata di Wilayah Prambanan, Sleman, D.I. Yogyakarta yang terjadi adalah masalah kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat yang rendah. Salah satu kelompok program atau aktivitas yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah pemenuhan akses sehingga pembangunan infrastruktur diperlukan. Permasalahan yang timbul dalam proses ini diiringi

dengan ketiga mekanisme yaitu peristiwa diantaranya kemiskinan, kondisi aksesibilitas masyarakat yang masih kurang, belum memadainya sarana prasarana penunjang aktivitas masyarakat, dan masih banyak lainnya.

Setelah memasuki tahap aliran masalah untuk mengidentifikasi serta menentukan prioritas isu permasalahan, tahapan selanjutnya yang akan dilalui adalah proses pencarian upaya penyelesaian. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam aliran kebijakan muncul berbagai alternatif solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur pariwisata di Kapanewon Prambanan, Sleman, D.I. Yogyakarta.

Alternatif solusi yang muncul pada proses aliran kebijakan dalam program pembangunan infrastruktur di Kapanewon Prambanan, Sleman, D.I. Yogyakarta diantaranya Kebijakan Umum APBD (KUA), Kebijakan pengalokasian Dana Keistimewaan, Kebijakan Bantuan Khusus Keuangan, dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus yang menjadi dasar pelaksanaan program pembangunan. Dalam aliran kebijakan ini, seluruh *stakeholders* yang terlibat bersinergi bersama untuk menentukan alternatif solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan.

Aliran politik memiliki pengaruh yang besar dalam keputusan agenda kebijakan. Hal tersebut dikarenakan faktor-faktor kekuatan politik akan bersaing dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya untuk menentukan keputusan. Pengaruh politik bahkan juga menimbulkan *conflict of interest* dalam *proses agenda setting* program pembangunan infrastruktur pariwisata di Kapanewon Prambanan ini. Pembangunan infrastruktur pariwisata memberikan berbagai manfaat dalam rangka memudahkan akses ke objek wisata sehingga berdampak pula pada tingginya angka wisatawan serta peningkatan pendapatan bagi para pelaku usaha di Kapanewon Prambanan. Akan tetapi, berbagai konsekuensi juga muncul akibat dari program pembangunan infrastruktur pariwisata seperti berkurangnya lahan pertanian, proses administrasi alih lahan untuk jalan yang rumit serta permasalahan tidak langsung seperti permasalahan sampah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait *agenda setting* dalam program pembangunan infrastruktur pariwisata di Wilayah Prambanan, Sleman, D.I. Yogyakarta masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh *stakeholders* terlibat, sehingga peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penentuan masalah agenda kebijakan, terutama dengan melakukan optimalisasi digital seperti terobosan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kab. Sleman yaitu melalui *platform* Lapor Sleman. Sosialisasi kepada masyarakat umum mengenai penggunaan aplikasi tersebut perlu ditingkatkan sehingga apabila terjadi permasalahan yang memiliki urgensi tinggi tidak perlu menunggu penyampaian melalui program seperti *reses*, *public hearing*, RAKORPIM, MUSREMBANG, dan kegiatan lain yang belum tentu rutin dilaksanakan setiap bulan.
2. Perlu adanya peningkatan pelaksanaan *agenda setting* melalui (a) melibatkan banyak *stakeholders* terkhusus akademisi yang belum ditemukan pada penelitian ini; (b) memaksimalkan ruang penyampaian aspirasi masyarakat dengan mengesampingkan kepentingan kelompok sehingga ruang penyampaian dapat dilakukan secara merata di seluruh wilayah.

3. Meningkatkan rasa memiliki dan kesungguhan dari setiap *stakeholders* yang terlibat dalam melaksanakan pembangunan dan dalam menentukan kebijakan sehingga hasil program serta kebijakan pembangunan lebih tepat sasaran
4. Perlu adanya kerangka kerja praktis sehingga tiap aktor pemangku kepentingan menjalankan tugas, peran, fungsi dan wewenang untuk menangani konflik kepentingan sehingga mekanisme kemitraan dalam proses *agenda setting* dapat berjalan dengan mengedepankan aspek netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan dapat berjalan dengan akuntabel
5. Perlu adanya pertimbangan lebih lanjut dalam pembangunan infrastruktur pariwisata sehingga permasalahan terkait dengan lingkungan dapat teratasi

Referensi

- [1] Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- [2] Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia
- [3] Ardinugroho, dkk. (2019). *Alternatif Indikator Infrastruktur di Kota Semarang: Identifikasi menuju Pengukuran berbasis kinerja*. Jurnal Riptek Vol 13 (2)
- [4] Atmaja dan Mahalli. (2015). *Pengaruh Peningkatan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Sibolga*. Jurnal Ekonomi Vol 3 (4)
- [5] BPS Yogyakarta. 2021. Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di DIY 2019-2021. Diakses pada 6 Juni 2022, dari <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/134/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html>
- [6] Cresswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [7] Darmawan, Eki dan Achmad Nurmandi. (2015). *Agenda Setting dalam Perencanaan Pembangunan Perbatasan di Kepri Tahun 2015*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik Vol 2 No.3
- [8] Ekon.go.id. 2018. *Buru Multiplier Effect* dari Infrastruktur, 14 BUMN Tandatangani Kerjasama Investasi Infrastruktur. diakses pada 14 Juni 2022, dari <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/1346/buru-multiplier-effect-dari-infrastruktur-14-bumn-tandatangani-kerjasama-investasi-infrastruktur>
- [9] Hakim, Lukmanul. (2010) *Industri Pariwisata dan Pembangunan Nasional*. Jurnal Among Makarti Vol 3 (5)
- [10] Kingdon, John W. (1984). *Agendas, Alternatives, dan Public Policies, 2nd ed*. New York: Harper
- [11] Kompas TV. 2021. Jokowi Jawab Kritik Pembangunan Infrastruktur di Masa Pemerintahannya. Diakses pada 14 Juni 2022, dari <https://www.kompas.tv/article/244443/jokowi-jawab-kritik-pembangunan-infrastruktur-di-masa-pemerintahannya>
- [12] Manzilati, A. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma, Metode, dan Aplikasi*. Malang: UB Pres
- [13] Moleong, Lexy J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- [14] Muhlizi, Arfan Faiz. (2017). *Penataan Regulasi dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional*. Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 6 (3)
- [15] Murni, Yusuf. (2016). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Grou
- [16] Mustari, Nuryanti. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik*. Yogyakarta: LeutikaPrio

- [17] Perda DIY Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan
- [18] Prapti, dkk. (2015). *Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat di Kota Semarang*. Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 17 (1)
- [19] Putri, dkk. (2022). *Agenda Setting Kebijakan Omnibus Law dalam Perspektif Framing Program TV Mata Najwa*. Jurnal Unismuh Vol 3 (1)
- [20] Puspita, dkk. (2016). *Analisis Penyusunan Agenda Kebijakan Publik (Studi Kajian Agenda Penyusunan Kebijakan Penyelesaian Pelanggaran RTRW oleh Industri CV. Evergreen Indogarment)*. Journal of Politic and Government Studies Vol 5 (4)
- [21] Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo
- [22] Sadono, Sukirno. (2011). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo
- [23] Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- [24] Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 401/0161 tahun 2021 tentang Penyampaian 15 Lokus Kapanewon Penanggulangan Kemiskinan
- [25] Yusuf, A. M. (2014). *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana